

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan badan pemerintahan yang memiliki beberapa tugas pokok. Tugas tersebut antara lain melakukan pelayanan kepada masyarakat mengenai perijinan surat, mengawasi situasi daerah setiap harinya, dan memberikan pelatihan-pelatihan yang melibatkan atau tidak melibatkan masyarakat sebagai peserta. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Badan Kesbangpol yang merupakan badan pemerintahan perlu membuat laporan penggunaan anggaran pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Peranan akuntansi di zaman globalisasi dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mengambil segala keputusan-keputusan yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan, baik dari akuntansi sektor publik maupun sektor swasta. Organisasi sektor publik sering dipandang sebagai organisasi yang dianggap tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta, sehingga kedudukannya dianggap lebih rendah dan jauh tertinggal dibandingkan dengan sektor swasta (Halim dan Muhammad, 2012:15).

Semua aktivitas lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel. Secara filosofi, dalam akuntansi bahwa akuntabilitas lebih ditekankan pada “*Value*” yang tercetak pada laporan keuangan, namun dalam organisasi nonprofit, akuntabilitas bukan hanya sebatas pada “*Value*” (nilai) secara spiritual yang diwujudkan melalui keikhlasan dan rasa syukur dalam memberikan sesuatu (Silvia dan Ansar, 2011:2).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Sedangkan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Implementasinya adalah seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah hendaknya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk itu selaku entitas akuntansi, SKPD harus menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Kesemua laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, sebagaimana dipersyaratkan oleh PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) (Alfi, 2017:16).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melihat penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Hal tersebut dinyatakan melalui penelitian dengan menulis judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Beranjak dari gambaran umum latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dan diteliti dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang?
2. Bagaimana Transparansi dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang?

### 1.3. Tujuan

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini diharapkan bisa bermanfaat dibidang pendidikan, pengetahuan, dan menjadi referensi di lain waktu dalam penelitian yang sama. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan wujud transparansi dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

### 1.4. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang realisasi anggaran Badan Kesbangpol Kota Semarang.
2. Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti tentang realisasi anggaran Badan Kesbangpol Kota Semarang.
3. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan dasar oleh pihak lain yang mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini dari sudut pandang yang beda.